

BAB I

PENDAH

ULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja (Putri & Erwati, 2024). Dalam kerangka hukum nasional, pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pemerintah Indonesia, 2003). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.

Dalam praktiknya, bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut, yang meliputi

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), menjadi sumber informasi utama dalam menilai kondisi keuangan daerah (Pemerintah Indonesia, 2010). Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2019), laporan keuangan perlu dianalisis lebih lanjut melalui teknik analisis keuangan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu laporan yang paling relevan untuk menilai kinerja keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), karena LRA menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu periode anggaran. Melalui LRA dapat diketahui bagaimana struktur pendapatan daerah, khususnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, serta besarnya dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Gambar 1.1

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019–2024



Data yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan gambaran mengenai kondisi realisasi pendapatan dan belanja daerah selama periode tertentu. Informasi tersebut dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan sumber-sumber pendapatan serta mengelola pengeluaran daerah. Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu dasar penting dalam menilai dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks sektor publik, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Mardiasmo, 2018). Mahmudi (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber

pendapatan, mengelola belanja, serta menjaga keseimbangan antarpenerimaan dan pengeluaran daerah. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal tanpa mengalami tekanan fiskal yang berlebihan.

Menurut Halim (2017), laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban sekaligus sebagai dasar evaluasi kondisi keuangan daerah. Namun demikian, angka-angka dalam laporan keuangan bersifat nominal sehingga memerlukan analisis lebih lanjut untuk dapat diinterpretasikan secara komprehensif. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan daerah digunakan sebagai instrumen untuk menilai kinerja keuangan secara lebih terukur dan sistematis.

Analisis rasio keuangan daerah merupakan metode analisis yang membandingkan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan untuk menghasilkan indikator yang dapat menggambarkan kondisi fiskal daerah (Julaeha & Penangsang, 2024). Mursyidi (2019) menjelaskan bahwa rasio keuangan daerah dapat digunakan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal, ketergantungan terhadap dana transfer, efektivitas realisasi pendapatan, serta efisiensi penggunaan anggaran. Dengan menggunakan rasio keuangan, pemerintah daerah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan struktur keuangan yang dimiliki.

Salah satu rasio yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah rasio derajat desentralisasi fiskal. Rasio ini mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin

tinggi kontribusi PAD, semakin besar peran daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri (Lolu, 2025). Abdul Halim (2014) menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal mencerminkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal yang dimiliki. Dengan demikian, rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai kekuatan fiskal daerah.

Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan dengan mengandalkan PAD dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Tingkat kemandirian yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sebaliknya, rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer. Tingginya rasio ketergantungan mencerminkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, sehingga ruang fiskal daerah menjadi terbatas. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan daerah apabila terjadi perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendapatan

daerah. Apabila realisasi PAD mendekati atau melampaui target, maka pengelolaan pendapatan dapat dikatakan efektif.

Sementara itu, rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja agar tidak melebihi pendapatan yang tersedia. Tingkat efisiensi yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menggunakan anggaran secara optimal tanpa pemborosan.

Secara empiris, penelitian mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan daerah. Aulia et al (2023) dalam penelitiannya mengenai Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019–2021 menemukan bahwa rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan kinerja keuangan yang belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldy (2023) pada Pemerintah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan tergolong cukup baik, tingkat kemandirian fiskal masih sangat rendah akibat kontribusi PAD yang belum signifikan terhadap total pendapatan daerah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Rustan Muttiarni dalam penelitiannya pada Kabupaten Pinrang, yang menyimpulkan bahwa rasio kemandirian dan kemampuan PAD masih sangat rendah sehingga daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, penelitian oleh Sherni (2024) pada Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah bervariasi, dengan beberapa daerah memiliki efektivitas PAD yang tinggi namun masih menghadapi permasalahan efisiensi belanja. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yuniasari & Pravitasari (2025) mengenai Pemerintah Kabupaten

Tulungagung menemukan bahwa rasio ketergantungan daerah sangat tinggi dan rasio kemandirian tergolong rendah, sehingga kinerja keuangan daerah dinilai masih lemah. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian ini memiliki perbedaan pada objek dan periode penelitian. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan periode 2020–2024 yang mencakup masa pandemi dan fase pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih spesifik mengenai kondisi kinerja keuangan daerah pada wilayah dan periode yang berbeda.

Periode tahun 2020–2024 merupakan periode yang penting untuk dianalisis karena mencakup masa pandemi Covid-19 dan fase pemulihan ekonomi. Pandemi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah, terutama melalui potensi penurunan PAD akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi peningkatan kebutuhan belanja untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, dan program pemulihan ekonomi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk

mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien agar tetap mampu menjaga stabilitas fiskal.

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Potensi tersebut seharusnya dapat menjadi sumber peningkatan PAD apabila dikelola secara optimal. Namun demikian, potensi tersebut belum tentu sepenuhnya tercermin dalam struktur pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis rasio keuangan

untuk menilai secara objektif tingkat kemandirian dan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan, sehingga dapat diketahui apakah potensi ekonomi yang dimiliki telah tercermin dalam struktur pendapatan daerah. Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu periode 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi fiskal daerah pada periode yang dinamis dan penuh tantangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu periode 2020–2024 menjadi penting untuk dilakukan. Analisis rasio keuangan daerah digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kemampuan fiskal daerah secara objektif

dan sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kinerja keuangan daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada periode berikutnya.

Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020–2024.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024?
2. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024?
3. Bagaimana tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024?
4. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024?
5. Bagaimana tingkat efisiensi keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah tahun 2020-2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2020-2024
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024
4. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024
5. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tahun 2020-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan dan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan rasio-rasio keuangan daerah, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan ketergantungan, sebagai alat untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah di berbagai wilayah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Informasi yang dihasilkan dari analisis laporan keuangan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam pengelolaan APBD, sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan fiskal yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kinerja.

2. Bagi DPRD dan pihak pengawas

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta sebagai dasar dalam

menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi akademisi dan peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi empiris dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi pembanding bagi penelitian sejenis di daerah lain.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik.

5. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan analisis dalam bidang akuntansi sektor publik serta memperdalam pemahaman mengenai penerapan analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2020-2024
2. Pengukuran kinerja keuangan daerah dibatasi pada penggunaan rasio-rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio ketergantungan, dan rasio derajat desentralisasi.
3. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor non-keuangan seperti aspek politik, sosial, atau budaya yang dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Yuniasari & Pravitasari (2025) yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung”.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2020-2024. Selain itu, penelitian ini menekankan pada analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah dalam konteks periode pandemi dan pemulihan ekonomi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas, serta sistematika penulisan. **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, kinerja keuangan daerah, analisis rasio keuangan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020–2024. Pada bab ini disajikan hasil analisis kinerja keuangan daerah yang meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efisiensi keuangan daerah. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dibahas dan diinterpretasikan berdasarkan teori serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB V Penutup

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil

penelitian mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020–2024 berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efisiensi keuangan daerah. Selain itu, pada bab ini disampaikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun peneliti selanjutnya.

BAB
II KAJIAN
PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Akuntansi pemerintahan merupakan sistem pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Bastian, 2010). Akuntansi pemerintahan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Melalui akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan negara dan daerah dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance.

Dalam konteks pemerintah daerah, akuntansi pemerintahan digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi pemerintahan kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Darise, 2018).

2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya

keuangan publik dalam satu periode

anggaran. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi pendapatan dan belanja, serta arus kas pemerintah daerah. Informasi tersebut digunakan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat, dalam menilai akuntabilitas serta kinerja pemerintah daerah.

Dalam sistem akuntansi sektor publik di Indonesia, laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Mahsun, 2016). Penerapan SAP bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan demikian, laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Halim & Kusufi, 2012).

Laporan keuangan juga berperan sebagai alat transparansi kepada masyarakat. Melalui laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan sesuai standar, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik yang bersumber dari pajak, retribusi, dan transfer pemerintah pusat telah dikelola dan digunakan. Oleh karena itu, laporan keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Nordiawan, 2016).

2.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam satu

periode pelaporan. LRA memberikan informasi mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Melalui LRA, dapat diketahui tingkat pencapaian target pendapatan daerah dan efektivitas pelaksanaan belanja daerah. Apabila realisasi pendapatan lebih rendah dari anggaran, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan. Sebaliknya, apabila realisasi belanja tidak sesuai dengan anggaran, maka dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan atau pengendalian anggaran.

Dalam penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah, Laporan Realisasi Anggaran menjadi sumber data utama karena memuat informasi yang diperlukan untuk menghitung berbagai rasio keuangan daerah. Dengan demikian, LRA menjadi dasar penting dalam melakukan analisis terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kinerja keuangan mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pendapatan daerah, mengelola belanja secara efisien, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kinerja keuangan yang baik ditandai dengan tingginya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer, serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Sebaliknya,

kinerja keuangan yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola keuangannya secara optimal dan masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal. Dengan mengetahui kondisi kinerja keuangan, pemerintah daerah dapat menentukan langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah agar lebih berorientasi pada kinerja dan kebutuhan masyarakat.

2.4 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan daerah merupakan metode yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran. Rasio keuangan diperoleh dari perbandingan antara pos-pos tertentu dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan daerah.

Beberapa rasio yang sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio ketergantungan.

2.4.1 Rasio Derajat Desentralisasi (DD)

Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total perolehan PAD dan total pendapatan daerah. Rasio tersebut memperlihatkan bagaimana pengaruh PAD pada total pendapatan daerah. Semakin tinggi perolehan PAD maka kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi semakin tinggi juga.

Menurut Mahmudi-2019, Rasio Derajat Desentralisasi(DD) dihitung

menggunakan rumus berikut ini :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1
Tingkat Derajat Desentralisasi

Kemampuan Keuangan	Derajat Desentralisasi (%)
Sangat Kurang	0,00 - 10,00
Kurang	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,0
Cukup	30,01 – 40,00
Baik	40,01 – 50,00
Sangat Baik	> 50, 00

Sumber: Litbang Departemen Dalam Negeri (1991)

Semakin tinggi nilai rasio derajat desentralisasi, semakin besar tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

2.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total pendapatan transfer dan total pendapatan daerah. Semakin tinggi pendapatan transfer yang didapatkan suatu daerah maka pemerintah daerah makin besar tingkat ketergantungannya pada transfer pemerintah pusat/provinsi.

Menurut Mahmudi-2019, Rasio Derajat Kemandirian Keuangan

Daerah dihitung menggunakan rumus berikut ini :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2

Tingkat Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan Daerah	Ketergantungan (%)
Sangat Kurang	0,00 - 10,00
Kurang	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,0
Cukup	30,01 – 40,00
Baik	40,01 – 50,00
Sangat Baik	> 50, 00

Sumber: Litbang Departemen Dalam Negeri (1991)

Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat/provinsi.

2.4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total perolehan PAD dan total pendapatan transfer serta pinjaman. Semakin besar nilai rasio tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah semakin tinggi.

Menurut Mahmudi-2019, Rumusan rasio tersebut yaitu:

$$Rasio Kemandirian = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3

Tingkat Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Ketergantungan Daerah	Ketergantungan (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Intruktif
Rendah	>25 - 50	Konsultatif
Sedang	>50 - 75	Partisipatif
Tinggi	>75 - 100	Delegatif

Sumber: Litbang Departemen Dalam Negeri (1991)

Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer.

2.4.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini diperoleh dengan membandingkan realisasi pemasukan PAD dan anggaran pemasukan PAD. Rasio tersebut memperlihatkan derajat kesanggupan daerah untuk mengatur pemasukan PAD selara melalui rencana program yang sudah ditetapkan. Menurut Mahmudi. (2019), rumusan rasio tersebut yaitu:

$$Rasio Efektifitas PAD = \frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. 4
Tingkat Penilaian Efektivitas PAD

Kriteria Efisiensi	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	< 75

Sumber: Litbang Departemen Dalam Negeri (1991)

2.4.5 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio ini diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah. Semakin kecil persentase rasio efisiensi, maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Menurut Mahmudi-2019, Rumusan rasio tersebut yaitu:

$$Rasio Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Biaya atau Belanja Daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 5
Tingkat Penilaian Efisiensi PAD

Kriteria Efisiensi	Efektivitas (%)
Sangat Efisien	<10
Efisien	10 – 20
Cukup Efisien	21 – 30
Kurang Efisien	31 – 40
Tidak Efisien	> 40

Sumber: Litbang Departemen Dalam Negeri (1991)

Rasio yang lebih kecil dari 100% menunjukkan penggunaan PAD yang efisien.

Melalui analisis rasio keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai secara lebih objektif dan terukur. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

2.5 Penelitian Relevan

Bagian ini memuat ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2. 6 Penelitian Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aulia et al (2023)	Analisis Laporan Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019– 2021	X: Analisis laporan keuangan (rasio efektivitas dan efisiensi) Y: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang	Rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Magelang belum sepenuhnya optimal dan masih perlu ditingkatkan.
2	Yuniasari & Pravitasari (2025)	Analisis Laporan Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan	X: Rasio keuangan (desentralisasi, ketergantungan, kemandirian, efektivitas	Ketergantungan sangat tinggi dan kemandirian rendah sehingga kinerja keuangan daerah masih lemah.

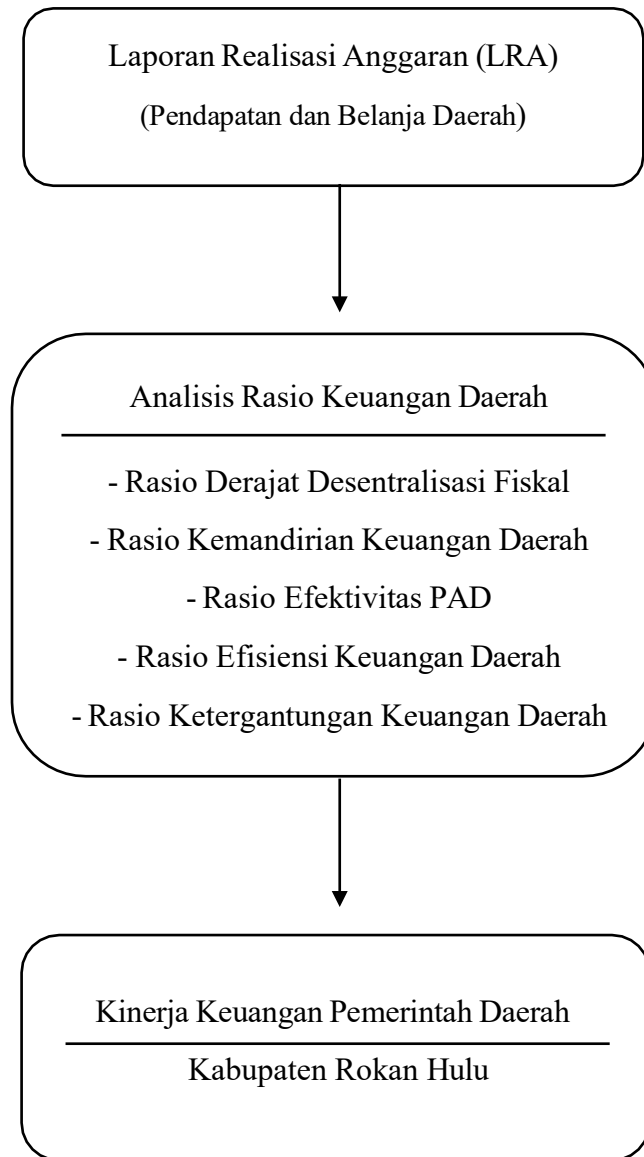
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung	PAD, efisiensi PAD) Y: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung	
3	Rinaldy (2023)	Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh	X: Analisis rasio keuangan daerah Y: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen	Kinerja keuangan cukup baik namun kemandirian fiskal masih sangat rendah akibat rendahnya PAD.
4	Sherni (2024)	Analisis Laporan	X: Rasio varians	Kinerja keuangan bervariasi dan banyak

		Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat	pendapatan, belanja, desentralisasi, efektivitas PAD, efisiensi belanja Y: Kinerja keuangan pemerintah daerah	daerah masih kurang efisien meskipun efektivitas PAD di beberapa daerah tinggi.
5	Rustan Muttiarni	Analisis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	X: Rasio kemandirian, kemampuan PAD, keserasian, pertumbuhan Y: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah	Kemandirian dan kemampuan PAD sangat rendah sehingga kinerja keuangan daerah masih lemah dan bergantung pada dana pusat.

			Kabupaten Pinrang	
--	--	--	----------------------	--

Simpulan penelitian relevan: Mayoritas daerah menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana pusat dan kemandirian PAD rendah, sehingga analisis rasio dari LRA terbukti penting untuk menilai kinerja keuangan. Namun, Kabupaten Rokan Hulu belum banyak dikaji—ini menjadi celah penelitian.

2.6 Kerangka konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu diukur melalui analisis rasio keuangan daerah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran

(LRA).

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan data mengenai pendapatan dan belanja daerah yang kemudian dianalisis menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan daerah.

Hasil perhitungan rasio-rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam hal kemampuan daerah membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, efektif, dan efisien.

BAB III

METODOLOGI

PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024. Laporan tersebut digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan selama periode penelitian.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka yang bersumber dari laporan keuangan daerah sehingga memungkinkan dilakukan perhitungan rasio keuangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang dapat diukur secara objektif dari laporan keuangan.

Data penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan daerah
Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2024

3.3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen berupa laporan keuangan daerah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran yang diunduh melalui website resmi BPKAD <https://bpkad.rokanhulukab.go.id/dokumen>

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan rasio laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Data disajikan dalam bentuk tabel dan persentase untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, rasio-rasio keuangan dianalisis secara deskriptif untuk menilai tren kinerja keuangan, tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menggunakan tingkat penilaian dari (Litbang Departemen Dalam Negeri, 1991).

3.5.1 Rasio Derajat Desentralisasi (DD)

Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total perolehan PAD dan total pendapatan daerah. Rumusan rasio tersebut yaitu:.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 1
Tingkat Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi

Kemampuan Keuangan	Derajat Desentralisasi (%)
Sangat Kurang	0,00 - 10,00
Kurang	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,0
Cukup	30,01 – 40,00
Baik	40,01 – 50,00
Sangat Baik	> 50, 00

Sumber: Litbang Departemen Dalam Negeri (1991)

Semakin tinggi nilai rasio derajat desentralisasi, semakin besar tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

3.5.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total pendapatan transfer dan total pendapatan daerah. Rumusan rasio tersebut yaitu:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Tingkat Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan Daerah	Ketergantungan (%)
Sangat Kurang	0,00 - 10,00
Kurang	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,0
Cukup	30,01 – 40,00
Baik	40,01 – 50,00
Sangat Baik	> 50, 00

Sumber: Litbang Departemen Dalam Negeri (1991)

Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat/provinsi.

3.5.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total perolehan PAD dan total pendapatan transfer serta pinjaman. Rumusan rasio tersebut yaitu:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Tranfer\ Pusat + Provinsi + Pinjaman} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Tingkat Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Ketergantungan Daerah	Ketergantungan (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Intruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 -75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Litbang Departemen Dalam Negeri (1991)

Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer.

3.5.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini diperoleh dengan membandingkan realisasi pemasukan PAD dan anggaran pemasukan PAD. Rumusan rasio tersebut yaitu:

$$Rasio\ Efektifitas\ PAD = \frac{Realisasi\ pendapatan\ daerah}{Anggaran\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 3.4
Tingkat Penilaian Efektivitas PAD

Kriteria Efisiensi	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	< 75

Sumber: Litbang Departemen Dalam Negeri (1991)

Nilai rasio yang tinggi menunjukkan pengelolaan PAD yang efektif.

3.5.5 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio ini diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah. Rumusan rasio tersebut yaitu:

$$Rasio\ Efisien\ PAD = \frac{\text{Realisasi Biaya atau Belanja Daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.5
Tingkat Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Efektivitas (%)
Sangat Efisien	<10
Efisien	10 – 20
Cukup Efisien	21 – 30
Kurang Efisien	31 – 40
Tidak Efisien	> 40

Sumber: Litbang Departemen Dalam Negeri (1991)

Rasio yang lebih kecil dari 100% menunjukkan penggunaan PAD yang efisien.